

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Agency Theory**

Jensen & Meckling (1976), menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana terdapat satu orang atau lebih (principal atau pemegang saham) menunjuk orang lain (agen atau manajemen) untuk bertindak atas nama pemilik. Para pemilik perusahaan berharap bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Manajemen diharapkan mampu menggunakan sumberdaya yang dipercayakan oleh pemilik semaksimal mungkin. Menurut Silaban dalam Syahadah (2022) untuk mengurangi adanya masalah agensi maka diperlukan adanya pihak independen yang dapat menjadi pihak penengah untuk menangani konflik tersebut yang lebih dikenal sebagai independen auditor. Karena auditor dianggap sebagai pihak independen antara agen yang bertugas sebagai penyedia informasi laporan keuangan dan para stakeholders yang bertugas sebagai pengguna informasi sehingga dapat mengurangi asymmetry information.

Menurut Silaban Suryani dalam Syahadah (2022) menjelaskan teori keagenan bahwa hubungan manajemen (agen) dengan pemegang saham (stakeholders) yang disebut dengan prinsipal. Munculnya perbedaan kepentingan diantara pihak internal dan eksternal sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Sehingga dibutuhkan pihak penengah untuk menghadapi konflik tersebut yaitu membutuhkan auditor eksternal yang bertugas untuk mengevaluasi dan memberikan opini terkait laporan keuangan perusahaan yang telah di buat dan disusun oleh manajemen sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk menyakinkan dan dapat dipercaya laporan keuangan perusahaan tersebut maka diperoleh Akuntan Publik untuk memeriksa kembali bahwa laporan keuangan perusahaan terbebas dari kecurangan dan telah di susun dengan standar akuntansi yang berlaku dan mendapatkan opini laporan keuangan wajar tanpa pengecualian.

Terdapat tiga masalah keagenan terkait dengan kepemilikan, yaitu masalah keagenan antara manajemen dan pemegang saham, masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, dan masalah keagenan antara pihak internal dan eksternal perusahaan (shareholder, debtholder, supplier) (Jensen & Meckling, 1976) yaitu:

1. Masalah keagenan pertama terjadi apabila kepemilikan saham tersebar, sehingga pemegang saham secara individual tidak dapat mengendalikan manajemen karena jumlah kepemilikannya tidak bisa menguatkan posisinya dalam mengendalikan perusahaan. Akibatnya, perusahaan bisa dijalankan hanya sesuai kepentingan manajemen itu sendiri.

2. Masalah keagenan kedua terjadi jika terdapat pemegang saham mayoritas, dengan kepemilikan saham terbesar pada pemegang saham tersebut. Akibatnya, pemegang saham mayoritas memiliki kendali mutlak dibanding pemegang saham minoritas, sehingga pemegang saham mayoritas bisa melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya, tetapi kemungkinan merugikan pemegang saham minoritas.

3. Masalah keagenan ketiga terjadi antara pihak internal dan eksternal perusahaan seperti debtholder atau supplier Menurut Liu and Sickles dalam Ardianta (2019). Sudut pandang masalah keagenan antara pihak internal dan eksternal perusahaan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami koneksi politik dan kinerja perusahaan. Sebagai pihak internal, manajemen bertanggung jawab terhadap pihak eksternal perusahaan seperti shareholder, debtholder, dan supplier. Perbedaan kepentingan dan tujuan antara pihak internal dan eksternal perusahaan memungkinkan terjadinya masalah keagenan yang dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Para peneliti ekonomi dan keuangan telah mengkategorikan masalah keagenan tiga jenis yaitu :

1. Masalah Prinsipal-Agen : Menurut Berle & Means dalam Swanto Sirait (2021) masalah agensi antara pemilik dan pengelola di perusahaan karena ada pemisahan kepemilikan kontrol yang ditemukan pada perusahaan perusahaan besar. Pemilik menugaskan tugas kepada para manajer untuk mengelola perusahaan dengan harapan bahwa manajer akan bekerja untuk kepentingan pemiliknya. Namun, manajer lebih tertarik pada maksimalisasi kompensasi mereka. Argumen tentang perilaku dalam memuaskan diri agen didasarkan pada perilaku rasionalitas manusia Williamson dalam Swanto Sirait (2021), yang menyatakan bahwa tindakan manusia bersifat rasional dan termotivasi untuk memaksimalkan tujuan mereka sendiri. Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dan kurangnya pemantauan yang tepat pada struktur kepemilikan yang kurang menyebar akan mengarah pada suatu konflik, yang dikenal sebagai konflik prinsipal–agen.

2. Masalah Prinsipal – Prinsipal Asumsi yang mendasari masalah peragenan jenis ini adalah konflik kepentingan antara pemilik utama dan pemilik kecil. Pemilik utama disebut sebagai orang atau sekelompok orang yang memegang saham mayoritas perusahaan, sementara pemilik kecil adalah orang-orang yang memegang sebagian kecil saham perusahaan. Fama & Jensen dalam Nugraha (2018) mengatakan pemilik mayoritas memiliki kekuatan voting yang lebih tinggi dan dapat mengambil keputusan apa pun demi keuntungan mereka, yang menghambat kepentingan pemegang saham minoritas. Jenis masalah keagenan ini berlaku di semua perusahaan, di mana kepemilikan terkonsentrasi pada beberapa orang saja atau pemilik keluarga, maka pemegang saham minoritas merasa sulit untuk melindungi kepentingan atau kekayaan mereka menurut Demsetz & Lehn dalam Ardianta (2019).

3. Masalah Principal – Kreditur : Menurut Damodaran dalam Tinamo (2021) konflik antara pemilik dan kreditur timbul karena adanya keputusan pembiayaan yang diambil oleh pemegang saham. Pemegang saham mencoba berinvestasi dalam proyek-proyek berisiko, di mana mereka mengharapkan laba yang lebih tinggi. Risiko

tinggi ini akan meningkatkan beban keuangan dan mengurangi penilaian atas hutang, sehingga hal ini akan berpengaruh pada kreditor. Jika proyek tersebut berhasil, maka pemilik akan menikmati keuntungan besar, sementara keuntungan yang dirasakan kreditor tetap karena mereka hanya mendapatkan bunga tetap. Di sisi lain, jika proyek gagal, maka kreditor akan turut menanggung kerugian dan secara umum masalah ini akan muncul dalam situasi seperti ini.

## **2.2 Kinerja Keuangan**

Menurut Mardiyati dalam Ardianta (2019) menyatakan kalau kinerja dari suatu perusahaan dapat juga disebut sebagai sebuah pencapaian atas kerjaan yang telah diselesaikan menurut standar tertentu dalam suatu periode. Menurut Harrison & Wicks dalam Ardianta (2019) kinerja perusahaan adalah sejumlah nilai yang dapat dihasilkan oleh suatu perusahaan lewat kegiatan operasinya dalam memperoleh keuntungan. Besar atau kecilnya keuntungan yang dihasilkan perusahaan dapat digunakan sebagai suatu cara dalam menentukan baik tidaknya kinerja perusahaan. Penelitian ini memakai dua rasio sebagai metode dalam mengevaluasi kinerja dari suatu perusahaan yaitu: ROA (Return on Assets). Rasio ROA atau tingkat pengembalian aset yang biasa disingkat menjadi ROA diukur dengan rumus jumlah keuntungan (laba) setelah pajak penghasilan dibagi terhadap jumlah keseluruhan aset (Zhang et al., 2020). ROA berfungsi untuk menunjukkan sejauh mana suatu perusahaan mampu mendapatkan keuntungan menggunakan aset milik perusahaan. ROA dipakai untuk menunjukkan seberapa efektif dan efisien kinerja manajemen perusahaan dalam mengelola asetnya (Pointer & Khoi, 2019). ROA dapat digunakan untuk menggambarkan bahwa perusahaan tersebut mengelolah aset yang dimilikinya dengan efisien dalam menjalankan bisnisnya. Semakin tinggi ROA perusahaan, berarti kinerja perusahaan semakin baik untuk memperoleh keuntungan bersih begitu juga sebaliknya.

Menurut Mulyadi dalam Nugraha (2018) pengertian dari kinerja keuangan adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan Munawir dalam Nugraha (2018) tujuan dari kinerja keuangan sendiri adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas perusahaan dimana, perusahaan harus memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas perusahaan dimana, perusahaan harus memenuhi kewajiban jangka panjangnya.
3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas perusahaan dimana, untuk mengukur kinerja laba perusahaan yang didapatkan dari sumber daya yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas perusahaan dimana, perusahaan dapat mampu membayar pokok hutang dan beban bunga pada waktunya sehingga perusahaan dapat mempertahankan usahanya supaya tetap stabil.

Kemudian, untuk mengukur rasio profitabilitas dengan ukuran Return On Asset (ROA). Berikut adalah teori dari Return On Asset (ROA) yaitu :

Return On Asset (ROA) adalah merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang.

$$ROA = \frac{\text{laba bersih}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Menurut Kumar dan Brealey dalam Aldhamari (2020) mengatakan bahwa Tobin's Q atau rasio q adalah rasio dari nilai pasar dari aset perusahaan (nilai pasar dari saham beredar ditambah hutang) dibagi dengan biaya penggantian aset perusahaan atau nilai buku.

$$\text{Tobins'Q} = \frac{\text{Market Value Equity} + \text{Debt}}{\text{Book Value Equity} + \text{Debt}}$$

Dimana

MVE = Nilai Pasar Ekuitas (closing price x jumlah saham beredar)

BE = Nilai Buku dari Total Hutang (kewajiban jangka pendek + kewajiban jangka Panjang)

Pada penelitian ini, peneliti mengukur kinerja keuangan dengan menggunakan Return On Asset (ROA) dan Tobins'Q untuk mengetahui pengaruh koneksi politik terhadap kinerja keuangan sesuai pada judul penelitian.

### **2.3 Koneksi Politik**

Menurut Li dkk dalam Swanto Sirait (2021) koneksi politik mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan dalam suatu perusahaan perbankan baik pengaruh positif maupun negatif. Koneksi politik dari sebuah perusahaan adalah umum di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, system transparan, dan pembatasan investasi asing oleh penduduk. Sementara itu koneksi politik kurang umum di negara-negara yang memiliki peraturan yang menetapkan batas-batas yang lebih ketat pada konflik kepentingan politik Faccio dalam dalam Aldhamari (2020).

Adhikari dkk dalam Ardianta (2019) menambahkan bahwa kepemilikan langsung oleh pemerintah dapat dilihat sebagai koneksi politik. Dengan demikian koneksi politik dapat diartikan sebagai hubungan kedekatan antara perusahaan dengan pemerintah. Leuz & Gee dalam Sari (2019) menyatakan dalam menyusun strategi bersaing perusahaan harus mampu mencari dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis, salah satunya melalui koneksi politik. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa koneksi politik sebagai contoh atas pengaturan rumah tangga negara yang dapat menurunkan manfaat dari pembiayaan global karena perusahaan yang memiliki koneksi politik lebih kecil kemungkinannya diperdagangkan secara terbuka di sekuritas asing. Koneksi politik tidak hanya merubah strategi keuangan perusahaan tetapi juga mempengaruhi kinerja jangka panjang perusahaan yang

terbukti bahwa perusahaan dengan koneksi politik yang mengalami kesulitan dalam membangun hubungan dengan pemerintah baru ketika pelindung mereka di pemerintah lama telah jatuh dari kekuasaan akan berkinerja lebih buruk di bawah pemerintah baru dan akan sulit meningkatkan masalah keuangan perusahaan.

Menurut Faccio dalam Aldhamari (2020) mengatakan bahwa dorongan perusahaan untuk memiliki koneksi politik telah mendapat perhatian khusus dari para pengamat ekonomi karena adanya indikasi perlakuan istimewa dari pemerintah, terlebih bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau orang memegang posisi penting dalam didalam pemerintahan. Perusahaan yang dengan koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah, memiliki akses mudah untuk memperoleh pinjaman modal, risiko pemeriksaan pajak rendah sehingga membuat perusahaan semakin agresif melakukan tax planning yang berakibat pada keburaman transparansi keuangan. Berbagai macam hak-hak istimewa dapat diperoleh perusahaan dengan koneksi politik bahkan saat terjadi krisis keuangan perusahaan akan mudah mendapat dana talangan dari pemerintah Kim & Zhang dalam Aldhamari (2020). Menurut Fisman dalam Aldhamari (2020) koneksi politik dipercaya sebagai suatu sumber yang sangat berharga bagi banyak perusahaan.

Menurut Wu dkk dalam Aldhamari (2020) koneksi Politik merupakan fenomena yang meluas di negara-negara berkembang dan efek dari transisi mereka telah banyak menarik riset yang berkembang. Perusahaan didefinisikan memiliki koneksi politik jika Chairman (CEO) perusahaan tersebut sedang menjabat atau mantan pejabat pemerintah. Menurut Faccio dalam Aldhamari (2020), bahwa perusahaan dapat dikatakan memiliki koneksi politik apabila paling tidak salah satu dari pimpinan perusahaan, pemegang saham mayoritas atau kerabat mereka pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat tinggi negara, anggota parlemen, menteri, atau berhubungan erat dengan politisi atau partai politik.

Oleh karena itu, koneksi politik penelitian ini mengikuti pengukuran pada penelitian sebelumnya yaitu variabel dummy.

Nilai 0 jika salah satu anggota perusahaan terhubung dengan koneksi politik  
Nilai 1 jika salah satu anggota perusahaan tidak terhubung dengan koneksi politik

#### **2.4 Risk Committee**

Menurut Miftakurrahman dalam Aldhamari(2020) tugas dan wewenang risk management committee yaitu mengidentifikasi adanya risiko, melakukan pengelolaan risiko serta mengevaluasi jalannya program manajemen risiko secara efektif. Menurut Jatiningrum & Fauzi dalam Aldhamari (2020), perhitungan variabel risk committee dilakukan dengan melihat apabila perusahaan membentuk risk committee sudah terpisah dari komite audit diberi nilai 1 dan jika risk committee masih tergabung dengan komite audit diberi nilai 0.

Menurut Subramaniam dalam Aldhamari (2020) RMC dapat tergabung dengan audit atau dapat pula menjadi komite yang terpisah dan berdiri sendiri. Komite terpisah yang secara khusus berfokus pada masalah risiko (RMC), dinilai dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mendukung dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam tugas pengawasan risiko dan manajemen pengendalian internal. Menurut Subramaniam dalam Aldhamari (2020) RMC yang terpisah dari audit akan lebih dapat mencurahkan lebih banyak waktu dan usaha untuk menggabungkan berbagai risiko yang dihadapi perusahaan secara luas dan mengevaluasi pengendalian terkait secara keseluruhan. Selain itu Bates dan Leclerc dalam Sari (2019) mengatakan RMC yang terpisah dari audit juga lebih memungkinkan dewan komisaris dalam memahami profil risiko perusahaan dengan lebih mendalam.



Risk Committee dalam penelitian ini diukur dengan sebagai berikut:

1. Jumlah Anggota Independen RC (RCINDP): Di bawah MCGC, anggota RC didefinisikan sebagai independen, jika dia bukan pejabat perusahaan, independen dari manajemen dan pemegang saham pengendali dan tidak mewakili kepemilikan terkonsentrasi atau keluarga dari sahamnya. Dalam penelitian ini mengikuti Yeh, Ng, Elamer dan Benyazid dalam Aldhamari (2020) yaitu mengukur independensi RC sebagai proporsi direktur independen terhadap anggota RC.
2. Jumlah Anggota RC (RCSIZE): Menurut Ng, Battaglia, Al-Hadi, Elamer dan Benyazid dalam Aldhamari (2020) RCSIZE diukur sebagai jumlah direktur pada RC.
3. Ketekunan RC (RCDELG): Menurut Hoque, Ng, Battaglia, Elamer dan Benyazid dalam Aldhamari (2020) adalah Jumlah pertemuan RC dalam satu tahun keuangan digunakan untuk mencatat ketekunan RC.
4. Kualifikasi RC (RCQUAL): Mengikuti Tao dan Hutchinson dan Al-Hadi dalam Aldhamari (2020) menggunakan kualifikasi akademik (misalnya sarjana/master/PhD) atau profesional (misalnya akuntan publik bersertifikat/analisis keuangan bersertifikat/asosiasi akuntan sewaan) di bidang keuangan/akuntansi untuk menentukan kualifikasi anggota RC, kemudian, mengukur RCQUAL sebagai proporsi direktur di RC dengan kualifikasi akademik atau profesional di bidang akuntansi/keuangan untuk anggota RC.
5. Proporsi RC (RCOVLP): Menurut Tao dan Hutchinson dalam Aldhamari (2020) RCOVLP diukur sebagai proporsi anggota RC yang juga duduk di salah satu dari tiga komite lainnya seperti komite audit, kompensasi dan nominasi.
6. Jenis kelamin RC (RCGNDR): Kami menggunakan proporsi perempuan dalam anggota RC ke RC untuk mengukur RCGNDR.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat ditunjukkan di dalam tabel berikut :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| No | Nama dan Tahun                | Judul   | Variable dan Indikator  | Teknik Analisis data  | Hasil   |
|----|-------------------------------|---|---|---|---|
| 1  | Redhwan Aldhamari et al.,2020 | The impact of political connection and risk committee on corporate financial performance: evidence from financial firms in Malaysia | X1= Political connection<br>X2=Risk Committee<br>Y= Financial Perfomance  | Studi ini, dengan menggunakan analisis komponen utama, memperoleh skor faktor untuk atribut RC untuk memproksikan efektivitas RC. Ini juga menggunakan akuntansi dan kinerja pasar untuk mengukur kinerja perusahaan. | Studi ini juga menemukan bahwa ukuran RC (RC diligence) memiliki dampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dan kinerja pasar. |
| 2  | Murtaza Masud et al.,2021     | The moderating role of director's financial expertise in political connections and corporate financial performance in Pakistan      | M= Director Financial Expertise's (DFEs)<br>X1= Political Connections (POCON)<br><br>Variabel Control<br>X1= Firm Size (FMSIZE)<br>X2= BIG 4 (BiG4) | Studi ini menggunakan data panel dari 220 perusahaan dari tahun 2008 hingga 2017 dan menggunakan analisis regresi kesalahan   | Hasilnya menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan perusahaan, dan                                |

|   |                      |   |   |   |   |
|---|----------------------|---|---|---|---|
|   |                      |   | <p>X3= Leverage (LEV)<br/> X4= Industry (INDUS)<br/> X5= YEAR effect (YEAR)</p> <p>Y= Financial Perfomence</p>      | standar yang dikoreksi panel  | keahlian keuangan direktur sebagai moderator memperkuat hubungan antara koneksi politik dan kinerja keuangan perusahaan.  |
| 3 | Swanto Sirait (2021) | Pengaruh Koneksi Politik dan Tarif Efektif Pajak terhadap Kinerja Keuangan dengan Pergerakan Harga Saham sebagai Pemoderasi | <p>X1= Koneksi Politik<br/> X2= Tarik Efektif Pajak<br/> X3= Pergerakan Harga Saham</p> <p>Y1= Kinerja Keuangan</p> | Metode analisis yang digunakan adalah analisis Regresi Berganda disertai dengan effect moderasi. Data penelitian diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia <a href="http://www.idx.co.id">www.idx.co.id</a> yang mengambil laporan keuangan perusahaan di bidang pangan dari tahun 2015-2019. | Hasil penelitian membuktikan bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Pergerakan harga saham mampu memoderasi pengaruh dari koneksi politik terhadap kinerja perusahaan. Sementara tarif efektif pajak tidak berpengaruh terhadap kinerja |

|   |                                |   |   |   |   |
|---|--------------------------------|---|---|---|---|
|   |                                |   |   |   | perusahaan. Pergerakan harga saham tidak mampu memoderasi pengaruh dari tarif efektif pajak terhadap kinerja perusahaan.                                |
| 4 | Ero Ardinanta (2019)           | Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Bank Loan Sebagai Variabel Mediasi                        | X1= Koneksi Politik<br><br>Variabel Kontrol<br>X2= Size<br>X3= Leverage<br><br>Y1= Kinerja Keuangan | Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan alat uji statistik yaitu regresi linear sederhana dan uji path dengan menggunakan spss. | Hasil penelitian koneksi politik berdampak negative terhadap kinerja keuangan dengan bankloan sebagai variabel mediasi                                  |
| 5 | Yudistira Arisa Nugraha (2018) | CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY(CSR) , KONEKSI POLITIK DAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan Saham | X1= CSR<br>X2= KONEKSI POLITIK<br><br>Y1= KINERJA KEUANGAN  | Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yg menghasilkan 34 perusahaan selama periode pengamatan tahun 2010 sampai tahun 2014 dan jumlah            | Penelitian ini memberikan hasil yang membuktikan bahwa CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan Sedangkan koneksi politik |

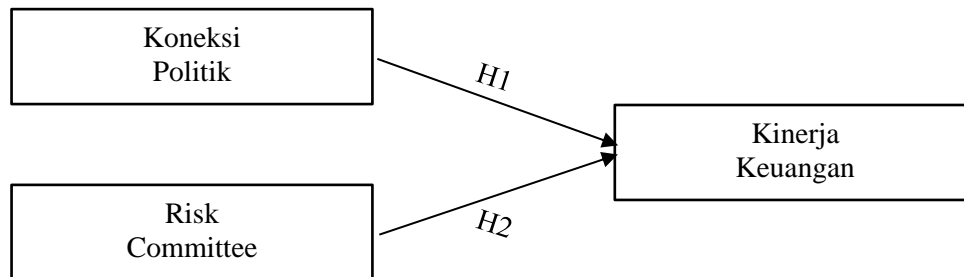
|   |                                |   |   |  |   |
|---|--------------------------------|---|---|--|---|
|   |                                | Kompas 100)   |   | obeservasi sebanyak 170 Metode peneelitan ini menggunakan metode regresi linier berganda   | memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kinerja keuangan   |
| 6 | Ivone dan Hendry Tinamo (2021) | Pengaruh kepemilikan negara, hubungan politik dan penghindaran pajak terhadap kinerja keuangan di Indonesia | X1= Kepimilikan negara<br>X2= Hubungan Politik<br>X3= Penghindaran Pajak<br><br>Y= Kinerja Keuangan | Dalam penelitian ini digunakan metode regresi linear berganda pada data panel untuk menguji hubungan setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Dengan menggunakan 165 perusahaan yang tercatat di BEI yang memenuhi kriteria sampel | Dalam penelitian ini didapatkan suatu kesimpulan bahwa kepemilikan negara berdampak signifikan positif terhadap ROE namun berdampak tidak signifikan terhadap ROA. Hubungan politik yang diukur dengan jumlah komisaris terhubung politik berdampak signifikan negatif terhadap |

|   |                               |  |  |  |  |
|---|-------------------------------|--|--|--|--|
|   |                               |  |  |  | ROA tetapi berdampak tidak signifikan terhadap ROE, sedangkan untuk jumlah direksi terhubung politik memiliki dampak tidak signifikan pada kinerja keuangan. Untuk variabel penghindaran pajak berdampak tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. |
| 7 | Rusiha Minanda Pratiwi (2022) | Dampak komite risiko dan koneksi politik sebagai variabel moderasi terhadap kinerja keuangan perbankan | M= Koneksi politik<br>X1= Risiko Komite<br>Y= Kinerja Keuangan | Pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan regresi linear berganda dan moderated regression analysis | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komite risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan  |

|   |                      |   |   |  |  |
|---|----------------------|---|---|--|--|
| 8 | Ivana Pudiwan (2010) | Partisipasi Komite Audit dan Komite risiko selaku organ dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan Asuransi dan Reasuransi di Indonesia | X1= Komite Audit<br>X2= Komite Risiko<br>Y1= Kinerja Keuangan | Peneliti menggunakan 25 perusahaan asuransi dan reasuransi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, dengan rentang waktu penelitian dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Perusahaan Asuransi & Reasuransi dan pengukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan | Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Perusahaan Asuransi & Reasuransi dan pengukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. |
|---|----------------------|---|---|--|--|

## 2.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kerangka teoritis mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

## 2.7 Pengembangan Hipotesis

### 2.7.1 Pengaruh koneksi politik terhadap kinerja keuangan

Hubungan politik diharapkan dapat memberikan nilai tambah untuk perusahaan, karena perusahaan yang memiliki hubungan politik dapat memanfaatkan hubungan tersebut untuk mendapatkan peluang kerja sama yang lebih besar. Perusahaan menjadi lebih mudah jika ada anggota partai politik di perusahaan mereka yang juga menjadi pejabat di pemerintahan dimana pada akhirnya dapat memberikan pengaruh dalam pengambilan keputusan dan membawa perubahan pada perusahaan untuk melakukan investasi terhadap peningkatan produktivitas Najaf & Najaf dalam Pratiwi (2022). Dalam studi Saeed Osazuwa, Chancharat dalam Pratiwi (2022) mengutarakan bahwa hubungan politik mempunyai korelasi negatif atas kinerja perusahaan. Namun dalam penelitian Huimin dalam Pratiwi (2022) menemukan bahwa hubungan politik tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja keuangan.

H1: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan



### **2.7.2 Pengaruh risk committee terhadap kinerja keuangan**

Keberadaan Risk Committee merupakan mekanisme pengendalian internal yang efektif dalam membantu Dewan Komisaris terkait tanggungjawabnya terhadap manajemen risiko di perusahaan dan meminimalisir kemungkinan risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang (Subramaniam et al., 2009). Berdasarkan PMK Nomor 191/PMK.09/2008, Risk Committee adalah komite memiliki tugas untuk melakukan pengawasan, menetapkan kebijakan, strategi, dan metodologi manajemen risiko. Anggota RC terdiri dari dewan komisaris ataupun pelaku profesi dari luar perusahaan (Glynis, 2017). Keberadaan RC berhubungan dengan jumlah anggota Dewan Komisaris, ketika jumlah anggota Dewan Komisaris semakin besar maka kemungkinan kemampuan dalam melakukan koordinasi terkait koneksi politik akan lebih meminimalisir risiko dengan pembentukan RC (Subramaniam et al., 2009). Risk Committee merupakan kekuatan perusahaan untuk membantu dalam mencapai tujuan bisnisnya dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang dapat melindungi reputasi perusahaan, sehingga dengan begitu akan meningkatkan kinerja perusahaan (Halim et al., 2017). Penelitian sebelumnya oleh (Halim et al., 2017) menemukan bahwa keberadaan RMC berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan. D. S. Tasya dan I. Gandakusuma / Jurnal Manajemen dan Usahawan Indonesia © Mei-Juni (2022) Vol. 45 No. 1 69 Memiliki RMC yang terpisah akan menghasilkan pemantauan risiko yang lebih baik sehingga dapat mengurangi kerugian yang akan timbul dan meningkatkan kinerja keuangan.

H2: Risk committee berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan bum